



# DIPLOMASI KEBUDAYAAN

KONSEP DAN RELEVANSI BAGI NEGARA BERKEMBANG:  
STUDI KASUS INDONESIA



TULUS WARSITO  
WAHYUNI KARTIKASARI  
Kata Pengantar: Yahya A. Muhaimin

# DIPLOMASI KEBUDAYAAN

KONSEP DAN RELEVANSI BAGI NEGARA BERKEMBANG:  
STUDI KASUS INDONESIA



Tulus Warsito  
Wahyuni Kartikasari

*Ombak*, 2007

DIPLOMASI KEBUDAYAAN: KONSEP DAN RELEVANSI  
BAGI NEGARA BERKEMBANG: STUDI KASUS INDONESIA  
Copyright©Tulus Warsito dan Wahyuni K, 2007

Cetakan kedua, Juli 2016

Penerbit *Ombak*  
Perumahan Nogotirto III, Jl. Progo B-15  
Yogyakarta Tlp. 0274-7019945, 08886864776;  
Fax. 0274-620606; e-mail: ombak\_community@yahoo.com

Hak cipta dilindungi undang-undang.  
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

PO.76.02.'07

Sampul: Jube'  
Tata letak: Didi  
Pracetak: Puspitasari

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)  
DIPLOMASI KEBUDAYAAN: KONSEP DAN RELEVANSI  
BAGI NEGARA BERKEMBANG: STUDI KASUS INDONESIA  
Yogyakarta: Penerbit *Ombak*, 2007  
xv + 242 hlm.; 14 x 21 cm  
ISBN: 979-3472-66-9

## PENGANTAR PENULIS

Istilah diplomasi kebudayaan memang bukanlah merupakan kosa kata baru. Kita sering mendengarnya, setidaknya kalau kita mengartikan diplomasi sekedar sebagai alat untuk mengelola hubungan antarbangsa dan menganggap kebudayaan hanya sebatas kesenian saja. Dengan demikian tak ada yang perlu dijelaskan secara khusus dalam prakata ini. Akan tetapi kalau diplomasi kebudayaan harus dijadikan sebagai kajian tersendiri untuk satuan mata kuliah, atau sebagai bahan diskusi yang mendalam mengenai jenis-jenis diplomasi, maka prakata singkat tentang buku ini menjadi penting untuk dibaca sebagai menu pembuka.

Konsep-konsep tentang diplomasi memang dapat ditemui di berbagai buku tentang hubungan internasional. Begitu juga kajian tentang kebudayaan, dengan mudah dapat kita baca di berbagai literatur. Sedangkan buku maupun tulisan tentang diplomasi kebudayaan masih sangat langka (kalau tidak boleh mengatakan tak ada sama sekali). Baik yang berbahasa Inggris, apalagi yang berbahasa Indonesia. Itulah sebabnya penulis berupaya menyusun buku ini dengan harapan

konsep-konsep diplomasi yang berkaitan dengan aspek kebudayaan dapat dikaji secara mendalam. Ada yang bersifat mikro seperti yang selama ini dikenali oleh awam, yakni: bahwa kalau kita mendengar istilah kebudayaan berarti ada delegasi kesenian suatu negara yang dikirimkan ke negara lain, ada pula dalam pengertian makro yang mencakup pengertian kebudayaan secara lebih luas, sampai dengan nilai-nilai ideologi, nasionalisme, ataupun globalisasi.

Dalam buku ini, diplomasi tidak hanya diartikan sebagai perundingan (negosiasi) saja, melainkan juga cara mengelola hubungan antarbangsa, baik dalam keadaan damai maupun (terutama) dalam situasi perang. Oleh karena itu, istilah diplomasi kebudayaan dalam buku ini bisa dibentangkan dari yang bersifat mikro, yang menganggap kebudayaan hanya sebagai kesenian saja, sampai dengan yang makro, yang menganggap pengelolaan hubungan antarbangsa dipastikan melibatkan aspek kebudayaan dalam arti yang luas.

Untuk membatasi ruanglingkup pembahasan buku ini sengaja penulis kaitkan dengan politik luar negeri dari negara-negara sedang berkembang saja, terutama dengan kasus yang terjadi di Indonesia, dengan harapan agar pembaca merasa lebih familiar, tanpa bermaksud untuk mengatakan bahwa di negara maju tidak ada diplomasi kebudayaan. Dalam upaya mengungkap hal yang sudah dibatasi itupun dipastikan buku yang sederhana ini masih jauh dari mencukupi. Pasti masih banyak kekurangan di sana sini, baik secara metodologis maupun (terutama) contoh-contoh kasus yang dikemukakannya.

Dalam rangka menyempurnakan isi buku itulah prakata ini disampaikan agar pembaca berkenan memberi tanggapan

guna perbaikan dalam edisi berikutnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini yang dimulai sejak sepuluh tahun yang lalu, termasuk di antaranya adalah Bapak Prof. Dr. Yahya Muahimin, mahaguru kami, yang dengan cermat berkenan menyempatkan menulis kata pengantar buku ini, dan Penerbit *Ombak* yang dengan jiwa besar berani menerbitkan buku ini. Sesedikit apa pun manfaat buku ini kami harapkan dapat memicu kita semua untuk terus-menerus berlomba dalam kebaikan.

Selamat membaca.

## Penulis

## DAFTAR ISI

Pengantar Penulis ~ v

Kata Pengantar ~ x

### Bab I Pendahuluan

- A. Definisi ~ 2
- B. Pelaku/aktor ~ 4
- C. Tujuan Diplomasi Kebudayaan ~ 4
- D. Sasaran Diplomasi Kebudayaan ~ 5
- E. Sarana Diplomasi Kebudayaan ~ 5
- F. Materi/Isi Diplomasi Kebudayaan ~ 5
- G. Negara-negara Sedang Berkembang ~ 5
- H. Ruang Lingkup ~ 16
- I. Konsep-konsep Diplomasi Kebudayaan ~ 19
- J. Tujuan Diplomasi Kebudayaan ~ 29

### Bab II Negara-negara Sedang Berkembang dalam Konstelasi Kebudayaan Modern Dunia

- A. Pendekatan yang Digunakan ~ 32
- B. Hegemoni Kebudayaan ~ 37
- C. Modernitas dan Pluralisasi Kebudayaan ~ 39
- D. Konflik Peradaban ~ 48

**Bab III Diplomasi Kebudayaan dalam Preferensi Politik Luar Negeri Negara-negara Sedang Berkembang**

- A. Idiom-idiom Kebudayaan Global ~ 57
- B. Nasionalisme ~ 60
- C. Pembangunan Nasional ~ 63
- D. Modernisasi ~ 64
- E. Kepemimpinan ~ 65

**Bab IV Politik Luar Negeri Mercusuar**

- A. *The New Emerging Forces* versus *The Old Established Forces* ~ 74
  - 1. Perjuangan Merebut Irian Barat ~ 78
  - 2. Konfrontasi Indonesia-Malaysia ~ 84
- B. Poros Jakarta – Peking ~ 96
- C. Pembangunan Infra Struktur Dalam Negeri ~ 116

**Bab V Diplomsu Kebudayaan Masa Orde Baru**

- A. Pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat (KIAS) ~ 129
- B. Taman Mini Indonesia Indah (TMII) ~ 161

**Bab VI Diplomasi Kebudayaan Pasca Orde Baru**

- A. Penghargaan Wayang Kulit Sebagai Warisan Kebudayaan Dunia ~ 171
- B. *Lake Toba Summit* ~ 178
- C. Forum Dialog Pasifik Barat Daya (*Southwest Pacific Dialogue*) ~ 185
- D. KTT Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika ~ 213

Daftar Pustaka ~ 238

Tentang Penulis



# KATA PENGANTAR

## DIPLOMASI KEBUDAYAAN YANG BERMAKNA Oleh: Yahya A. Muhaimin<sup>o</sup>

Diplomasi merupakan cara, dengan peraturan dan tata-krama tertentu, yang digunakan suatu negara guna mencapai kepentingan nasional negara tersebut dalam hubungannya dengan negara lain atau dengan masyarakat internasional. Dengan demikian, dalam hubungan internasional, diplomasi tidak bisa dipisahkan bertalian sangat erat dengan politik luar negeri dan juga dengan politik internasional.

Secara konvensional, dalam bentuknya yang paling tajam, diplomasi berupa perundingan yang dilakukan oleh para pejabat resmi negara sebagai pihak-pihak yang mewakili kepentingan nasional masing-masing negara. Dalam perkembangannya kemudian, pelaku-pelaku diplomasi bukan hanya pejabat negara, melainkan juga kalangan swasta atau individu-individu yang mewakili kepentingan nasional negaranya

---

<sup>o</sup> Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional pada Universitas Gadjah Mada, mantan Mendiknas RI

dengan sepengetahuan atau persetujuan pemerintah. Karena pertimbangan itu, dalam dunia internasional, sekarang ini kita mengenal istilah-istilah “*first track diplomacy*”, “*second track diplomacy*”, bahkan “*third track diplomacy*” dan “*fourth track diplomacy*”. Dalam konteks itu, kita kini mengenal apa yang disebut “diplomasi kebudayaan”; kalau dahulu efektivitas diplomasi memerlukan dukungan politik atau ekonomi atau kekuatan militer yang riil, namun sekarang ini justru kekuatan ekonomi, politik, dan militer dalam hal-hal tertentu akan bersifat “*counter productive*”, tidak akan membantu tercapainya hasil yang dituju.<sup>1</sup> Bahkan negara super-power seperti Amerika Serikat yang memiliki kekuatan ekonomi dan militer, kadang kala mengesampingkan penggunaan kekuatan militer dan ekonominya dengan lebih menonjolkan penggunaan bidang kebudayaan. Presiden John F. Kennedy pernah dalam beberapa masa pada tahun 1960-1963 secara intensif menggunakan segi-segi kebudayaan guna menopang diplomasinya, yaitu dengan mengirimkan sukarelawan yang memiliki keahlian di bidang pendidikan dan olahraga serta seni, terutama seni musik, ke banyak negara-negara berkembang, termasuk ke Indonesia, yang terkenal dengan nama “*Peace Corps*”.

---

<sup>1</sup> Lihat, misalnya, Stanley Hoffmann, *World Disorder; Troubled Peace in the Post Cold War Era*, New York: Rowman & Littlefield Publisher Inc., 1998, hlm. 25-26. Menyebutkan bahwa sejak awal tahun 1960-an adanya tendensi yang berupa ketidak-efektifan penggunaan kekuatan militer Amerika Serikat dalam pelaksanaan politik luar negerinya terhadap negara-negara berkembang, dan perlunya mempertimbangkan faktor-faktor lain, termasuk faktor kebudayaan.

Penggunaan “diplomasi kebudayaan” yang termasyhur oleh Amerika Serikat dilakukan di masa pemerintahan Presiden Richard M. Nixon tatkala merintis pembukaan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang telah berpuluh-puluh tahun tidak dibuka sejak RRT diperintah oleh Pemerintah Komunis di bawah Mao Zedong. Untuk memuluskan perundingannya dengan RRT, Amerika Serikat mengirimkan satu tim olahraga ping-pong. Sejak itulah “Diplomasi Ping-Pong” Amerika Serikat terkenal di seluruh dunia.

Diplomasi kebudayaan juga secara cukup konsisten dilakukan oleh Jepang tatkala Jepang mengalami kemunduran diplomasinya yang bersandar pada keunggulan ekonomi. Pada awal tahun 1970-an Jepang mengalami “boom” pertumbuhan ekonomi begitu dahsyat. Banyak negara berkembang menganggap Jepang waktu itu bersifat “egoistis”, hanya mementingkan kemakmuran Jepang dengan mengabaikan kesejahteraan negara-negara berkembang yang menjadi mitra kegiatan ekonomi para konglomerat Jepang. Para konglomerat Jepang yang menjadi investor di banyak negara dirasakan melantarkan rakyat di negara setempat dengan melakukan persekongkolan dengan para elite setempat. Pada tahun-tahun 1973-1974 Jepang dilanda protes besar-besaran di beberapa negara, khususnya Korea Selatan, Thailand dan Indonesia. Di Indonesia kejadian itu terkenal dengan kerusuhan “14 Januari 1974” atau “Peristiwa Malari”. Karena begitu dahsyatnya gelombang anti-Jepang di banyak negara, pada tahun 1976 pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Fukuda melancarkan politik luar negeri yang lebih

bertumpu pada kerjasama bidang kebudayaan, bukan lagi mengutamakan kerjasama ekonomi. Politik luar negeri Jepang itu terkenal dengan istilah "Doktrin Fukuda" yang dipegang dengan cukup kuat hingga masa sekarang.

Barangkali tidak ada efektifitas dan konsistensi penerapan diplomasi kebudayaan seefektif "Diplomasi Ping Pong" Amerika Serikat yang ditopang oleh otoritas kekuatan politik dan militernya, atau sekonsisten diplomasi kebudayaan Jepang yang ditopang oleh kekuatan ekonominya. Dari fenomena tersebut, kita dapat mengatakan bahwa diplomasi kebudayaan dapat diterapkan untuk mencapai kepentingan nasional yang "sangat penting" yang pelaksanaannya membutuhkan waktu yang relatif sangat singkat sebagaimana dalam "Diplomasi Ping Pong", atau untuk mencapai kepentingan nasional jangka panjang sehingga memerlukan *sustainability* pelaksanaannya sebagaimana diplomasi kebudayaan dalam "Doktrin Fukuda". Di samping itu, diplomasi kebudayaan juga memerlukan topangan kemantapan bidang-bidang yang lain, dan memerlukan keuletan lobi yang efektif, terutama bagi negara-negara yang secara politik, militer atau ekonomi tidak begitu kuat.

Dari pembahasan sekilas di atas, kita juga perlu membedakan kegiatan kebudayaan ke luar negeri yang merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri dengan kegiatan kebudayaan yang merupakan bagian dari bidang kepariwisataan yang tidak secara langsung merupakan bagian dari pelaksanaan politik luar negeri, sebab kepariwisataan lebih banyak berkaitan dengan kegiatan ekonomi makro, dan lebih difokuskan untuk membangun citra (*public opinions*) dalam

hubungan internasional. Contohnya: pameran Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat (KIAS). Pada pertengahan tahun 1998, tatkala citra Indonesia begitu "rendah", Atase Pendidikan dan Kebudayaan (Atdikbud) pada Kedutaan Besar Indonesia di Washington DC melancarkan kegiatan kebudayaan selama sebulan penuh di seluruh Amerika Serikat, yang dinamakan "*Indonesian Cultural Road Show*" dan kegiatan "seminar tentang Indonesia" yang dimotori oleh Atdikbud bekerjasama dengan Permias (Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat). Program "Cultural Road Show" itu berlangsung amat lancar dan berhasil baik berkat dukungan penuh Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada waktu itu, Profesor Dr. Dorodjatun Kuntjoro Jakti, dan bantuan yang sangat besar dari Menteri Pariwisata pada saat itu, Drs. Marzuki Usman, MSc., dan Direktur TVRI.

Dari pembahasan di atas, ada beberapa hal yang dapat ditegaskan di sini. **Pertama**, penerapan diplomasi kebudayaan, bagaimanapun juga bentuknya, harus integral dengan kebijakan politik luar negeri yang dikoordinasi penuh oleh Departemen Luar Negeri. **Kedua**, untuk menjaga efektifitas dan menghindarkan *overlapping* atau campur aduk, kegiatan diplomasi kebudayaan perlu dibedakan dengan kegiatan pariwisata, walaupun keduanya harus saling mendukung. **Ketiga**, kegiatan diplomasi kebudayaan harus integral dan sinergi dengan program-program bidang-bidang lainnya, khususnya program yang dikoordinasi oleh Departemen Luar Negeri, baik hal itu merupakan kegiatan "*second track diplomacy*" atau pun "*third track diplomacy*". **Keempat**, pelaksanaan diplomasi kebudayaan memerlukan dukungan

kewibawaan politik, atau kekuatan ekonomi, atau bahkan postur kekuatan militer yang memadai, disamping memerlukan *continuity* atau *sustainability* pelaksanaannya oleh pemerintah yang mungkin silih berganti. Kelima, diplomasi kebudayaan sering sangat efektif dan relevan dilaksanakan oleh negara-negara maju, misalnya Uni Soviet dengan kemahiran warganya dalam tari ballet yang amat jarang dilakukan, atau di mana *political efficacy* pengiriman para matador maupun para penari dan penyanyi dari Spanyol ke negara-negara lain.

Buku *Diplomasi Kebudayaan* yang ditulis oleh Dr. Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, ST, SIP, M.Si, dosen senior pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, telah memaparkan cukup banyak mengenai bidang yang amat menarik dari hubungan internasional pada masa pasca Perang Dingin ini. Penggunaan konsep-konsep politik internasional yang lebih solid, dan contoh-contoh yang lebih tepat, serta ditopang oleh perspektif yang lebih luas, tentu saja akan lebih memantapkan buku ini. Buku ini jelas telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di masa datang, dan di samping itu buku ini telah memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hubungan internasional.

Yogyakarta, 18 Mei 2006

Prof. Dr. Yahya A. Muhaimin

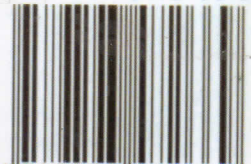
Dalam buku ini, diplomasi tidak hanya diartikan sebagai perundingan (negosiasi) saja, melainkan juga cara mengelola hubungan antarbangsa, baik dalam keadaan damai maupun (terutama) dalam situasi perang. Oleh karena itu, istilah diplomasi kebudayaan dalam buku ini bisa dibentangkan dari yang bersifat mikro, yang menganggap kebudayaan hanya sebagai kesenian saja, sampai dengan yang makro, yang menganggap pengelolaan hubungan antarbangsa dipastikan melibatkan aspek kebudayaan dalam arti yang luas.



Buku *Diplomasi Kebudayaan* yang ditulis oleh Dr. Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, ST, SIP, MSi, dan, dosen senior pada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, telah memaparkan cukup banyak mengenai bidang yang amat menarik dari hubungan internasional pada masa pasca Perang Dingin ini. Penggunaan konsep-konsep politik internasional yang lebih solid, dan contoh-contoh yang lebih tepat, serta ditopang oleh perspektif yang lebih luas, tentu saja akan lebih memantapkan buku ini. Buku ini jelas telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di masa datang, dan di samping itu buku ini telah memperkaya khasanah kepustakaan ilmu hubungan internasional.

Yahya A. Muhaimin

ISBN 979-3472-66-9



Mata Ais Inspirasi

Jalan Ngutarto III, J. Pringo B. 15 Yogyakarta  
T. 701985 0888864776 Fax 0274 829606  
Email: lumbak\_culture@yahoo.com